

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2020



**DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2020.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2020 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun keempat dalam masa RENSTRA Tahun 2018.-2023 LKj Tahun 2020 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2018.-2023).

LKj Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016. Penyusunan LKj Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2020 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. Komitmen dalam penyusunan LKj Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2020 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas

kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa pada tahun 2020, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2020 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 12 (*tiga belas*) indikator kinerja utama, terdapat 12 (*tiga belas*) indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya *good governance* pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2020 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Watampone, 22 Februari 2021  
**Kepala Dinas PMD Kab. Bone**



**Drs. A. GUNADIL UKRA, MM**  
Pangkat. Pembina Utama Muda  
Nip. 19671006 199303 1 010

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                      | <b>ii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                          | <b>iv</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                        | <b>v</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                   | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang.....                          | 1         |
| 1.2 Maksud dan Tujuan .....                      | 2         |
| 1.3 Gambaran Umum Organisasi .....               | 2         |
| 1.4 Isu Strategis .....                          | 6         |
| 1.5 Inovasi Pelayanan Publik .....               | 7         |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>          | <b>8</b>  |
| 2.1 Rencana Strategis .....                      | 8         |
| 2.1.1 Visi .....                                 | 8         |
| 2.1.2 Misi .....                                 | 8         |
| 2.1.3 Tujuan dan Indikator Kinerja .....         | 11        |
| 2.1.4 Sasaran .....                              | 12        |
| 2.1.5 Program untuk Pencapaian Sasaran .....     | 13        |
| 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....           | 13        |
| 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) .....          | 14        |
| 2.4 Rencana Anggaran Tahun 2020 .....            | 15        |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>        | <b>19</b> |
| 3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....             | 19        |
| 3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama 2020 ..... | 21        |
| 3.1.2 Perbandingan Capaian Kinerja .....         | 23        |
| 3.2 Realisasi Anggaran .....                     | 32        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                      | <b>36</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                             | <b>38</b> |

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 1.1 PNS di Dinas PMD berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2020 .....                   | 5  |
| Tabel 1.2 PNS di Dinas PMD berdasarkan tingkat Diklat PIM Tahun 2020 .....                   | 5  |
| Tabel 1.3 PNS di Dinas PMD berdasarkan golongan dan kepangkatan Tahun 2020 .....             | 6  |
| Tabel 1.4 PNS di Dinas PMD berdasarkan eselon Tahun 2020 .....                               | 6  |
| Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas PMD .....                                       | 11 |
| Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas PMD .....                                      | 12 |
| Tabel 2.3 Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020 .....                                  | 13 |
| Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas PMD Tahun 2020.....                                       | 14 |
| Tabel 2.5 IKU Dinas PMD .....  | 15 |
| Tabel 2.6 Rencana Belanja Dinas PMD Tahun 2020 .....   | 16 |
| Tabel 2.7 Alokasi Per Sasaran Tahun Anggaran 2020.....                                       | 16 |
| Tabel 3.1 Skala Pengukuran Ordinal.....  | 20 |
| Tabel 3.2 Pencapaian Indikator Sasaran .....   | 20 |
| Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Dinas PMD Tahun 2020 .....                               | 21 |
| Tabel 3.4 Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran .....                             | 22 |
| Tabel 3.5 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran 1 .....                           | 23 |
| Tabel 3.6 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan tahun sebelumnya Sasaran 1  | 24 |
| Tabel 3.7 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran 2 .....                           | 25 |
| Tabel 3.8 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan tahun sebelumnya Sasaran 2  | 26 |
| Tabel 3.9 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran 3 .....                           | 27 |
| Tabel 3.10 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan tahun sebelumnya Sasaran 3 | 28 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi Dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

LKj Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

LKj Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan proses untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang selanjutnya dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

## **1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

### **1.3.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Pembentukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu sebagai berikut:

a. Tugas Pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah

b. Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :



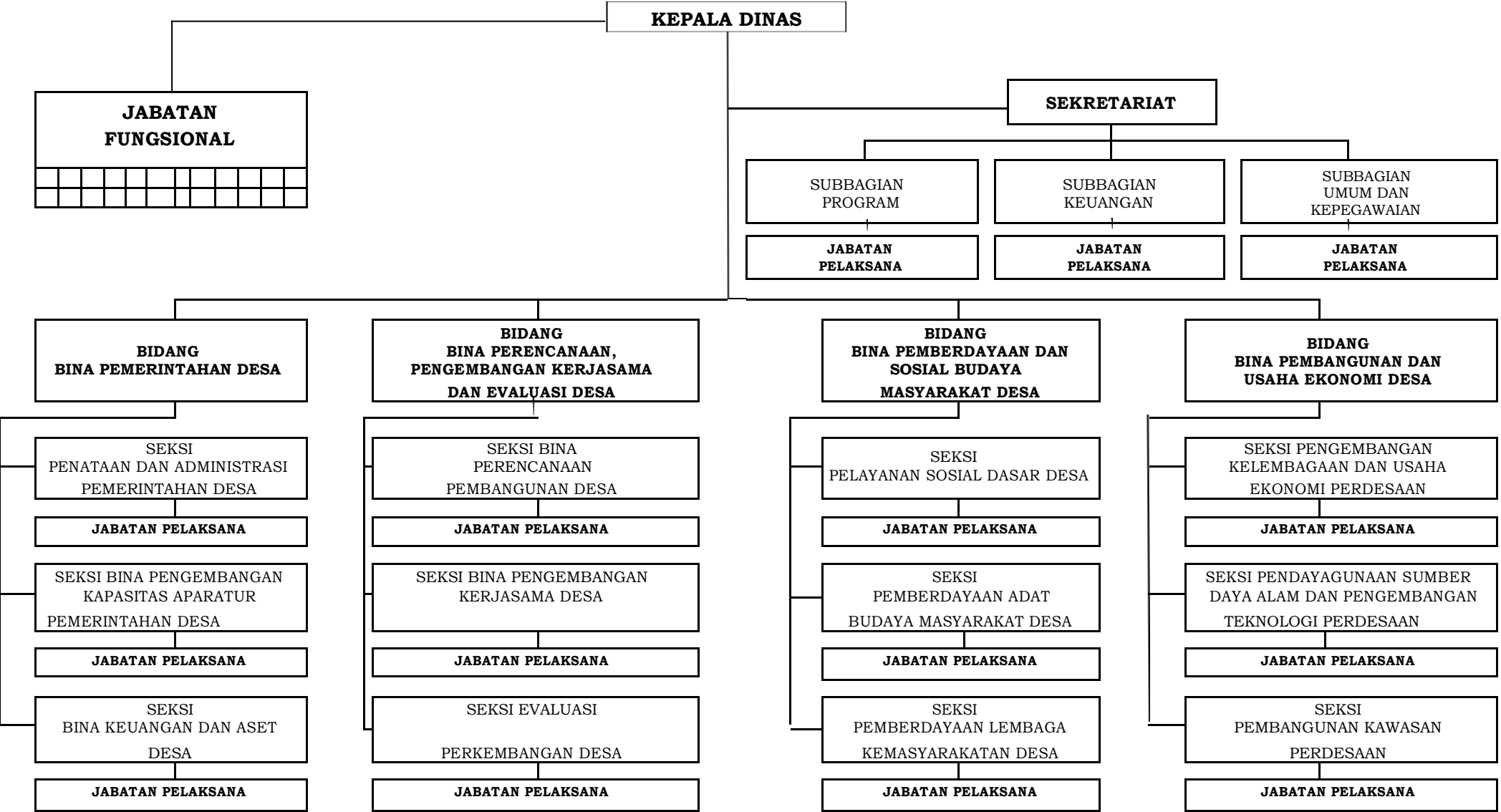
Berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka adapun susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone terdiri dari :

- a. Kepala Dinas,
- b. Sekretariat, terdiri dari 3 sub bagian :
  - 1) Sub Bagian Program;
  - 2) Sub bagian Keuangan; dan
  - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Bina Pemerintahan Desa terdiri dari :
  - 1) Seksi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa;
  - 2) Seksi Bina Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa; dan
  - 3) Seksi Bina Keuangan dan Aset Desa.
- d. Bidang Bina Pengembangan Kerjasama, Evaluasi Desa dan Kelurahan terdiri dari :
  - 1) Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa dan Kelurahan;
  - 2) Seksi Pengembangan Kerjasama dan Sumber Daya Desa dan Kelurahan ; dan
  - 3) Seksi Evaluasi Perkembangan Desa, Desa Adat dan Kelurahan.
- e. Bidang Bina Pemberdayaan dan Sosial Budaya Masyarakat terdiri dari :
  - 1) Seksi Pelayanan Sosial Dasar;
  - 2) Seksi Pemberdayaan Adat Budaya Masyarakat; dan
  - 3) Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
- f. Bidang Bina Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa terdiri dari :
  - 1) Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Usaha Ekonomi Perdesaan;
  - 2) Seksi Pendayagunaan SDA dan Pengembangan Teknologi Pedesaan; dan
  - 3) Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- g. UPTD
- h. Kelompok Jabatan Pelaksanaan dan Jabatan Fungsional.



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BONE  
NOMOR 73 TAHUN 2020  
TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

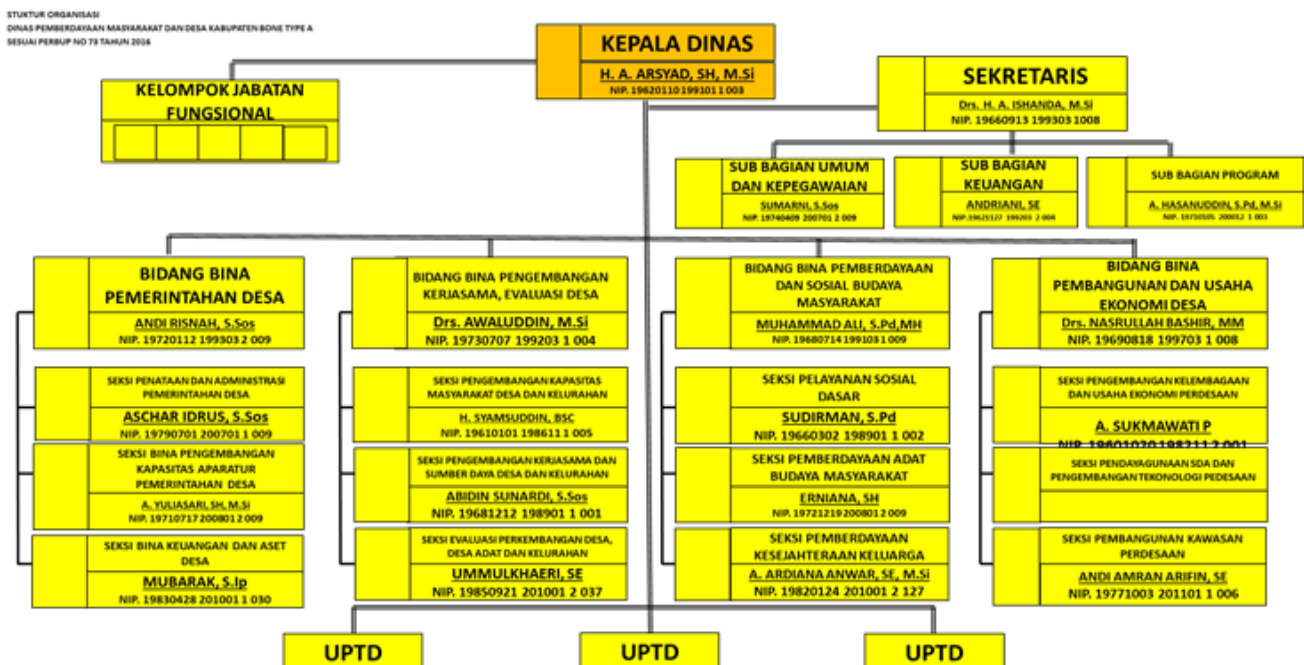
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BONE**



- Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### c. Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki susunan organisasi sebagai berikut :



Berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka adapun susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone terdiri dari :

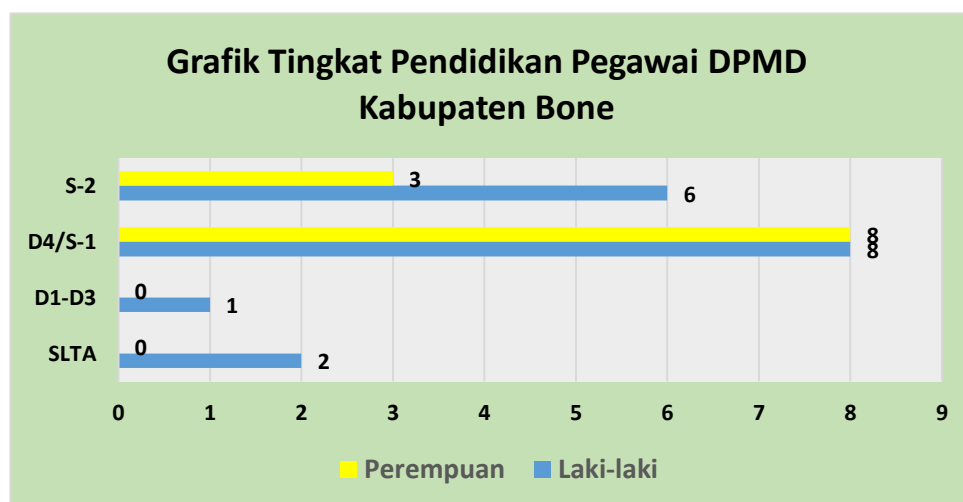
- a. Kepala Dinas,
  - a. Sekretariat, terdiri dari 3 sub bagian :
    - 1) Sub Bagian Program;
    - 2) Sub bagian Keuangan; dan
    - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Bidang Bina Pemerintahan Desa terdiri dari :
    - 1) Seksi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa;
    - 2) Seksi Bina Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa; dan
    - 3) Seksi Bina Keuangan dan Aset Desa.
  - c. Bidang Bina Perencanaan Pengembangan Kerjasama dan Evaluasi Desa dari :
    - 1) Seksi Bina Perencanaan Pembangunan Desa;
    - 2) Seksi Bina Pengembangan Kerjasama Desa; dan
    - 3) Seksi Evaluasi Perkembangan Desa.
  - d. Bidang Bina Pemberdayaan dan Sosial Budaya Masyarakat terdiri dari :
    - 1) Seksi Pelayanan Sosial Dasar DEsa;
    - 2) Seksi Pemberdayaan Adat Budaya Masyarakat Desa; dan
    - 3) Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
  - e. Bidang Bina Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa terdiri dari :
    - 1) Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Usaha Ekonomi Perdesaan;
    - 2) Seksi Pendayagunaan SDA dan Pengembangan Teknologi Pedesaan; dan
    - 3) Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan.
  - f. UPTD
  - g. Kelompok Jabatan Pelaksanaan dan Jabatan Fungsional.

Dalam menyelenggarakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone, saat ini didukung sebanyak 77 orang terdiri dari 28 orang PNS dan 49 orang Non PNS. Dari 28 PNS yang terdiri dari:

- a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

**Tabel 1.1**  
**PNS di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020**

| No | Tingkat Pendidikan | Laki-laki | Perempuan |
|----|--------------------|-----------|-----------|
| 1  | SLTA               | 2         | -         |
| 2  | D1-D3              | 1         | -         |
| 3  | D4/S-1             | 8         | 8         |
| 4  | S-2                | 6         | 3         |
|    | <b>Jumlah</b>      | <b>17</b> | <b>11</b> |



Berdasarkan Grafik diatas, tingkat pendidikan pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone di dominasi oleh Sarjana, hal ini terlihat dari banyaknya jumlah pegawai yang berijazah Sarjana yakni, sebanyak 16 orang yang berijazah S1 dan 9 orang yang berijazah S2.

- b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Penjenjangan :

**Tabel 1.2**  
**PNS di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**Berdasarkan Pendidikan Diklat Pim Tahun 2020**

| No | Pendidikan Diklat Pim | Laki-laki | Perempuan |
|----|-----------------------|-----------|-----------|
| 1  | Diklat Pim II         | 1         | -         |
| 2  | Diklat Pim III        | 2         | -         |
| 3  | Diklat Pim IV         | 3         | 4         |
|    | <b>Jumlah</b>         | <b>6</b>  | <b>4</b>  |

Sumber Data : DPMD Kab. Bone

- c. Berdasarkan Status dan Golongan/Kepangkatan :

**Tabel 1.3**  
**PNS di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Berdasarkan Golongan dan Kepangkatan Tahun 2020**

| No | Pangkat            | Golongan       | Laki-laki | Perempuan |
|----|--------------------|----------------|-----------|-----------|
| 1  | Pengatur Muda      | Golongan II a  | 1         | -         |
| 2  | Pengatur Muda TK I | Golongan II b  | -         | -         |
| 3  | Pengatur           | Golongan II c  | 1         | -         |
| 4  | Pengatur TK I      | Golongan II d  | 1         | -         |
| 5  | Pengatur Muda      | Golongan III a | 1         | 5         |
| 6  | Pengatur Muda TK I | Golongan III b | 1         | -         |
| 7  | Penata             | Golongan III c | 4         | 2         |
| 8  | Penata TK I        | Golongan III d | 4         | 3         |
| 9  | Pembina            | Golongan IV a  | 3         | 1         |
| 10 | Pembina TK I       | Golongan IV b  | -         | -         |
| 11 | Pembina Utama Muda | Golongan IV c  | 1         |           |
|    |                    | <b>Jumlah</b>  | <b>17</b> | <b>11</b> |

*Sumber Data : DPMD Kab. Bone*

Berdasarkan Tabel diatas, Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone sebanyak 28 orang, terdiri dari 17 orang laki-laki dan 11 orang perempuan, dimana jumlah pegawai terbanyak berdasarkan pangkat dan golongan terbanyak pada golongan III/d dan hanya 3 orang yang berada pada golongan II.

- d. Berdasarkan Eselonisasi

**Tabel 1.4**  
**PNS di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Berdasarkan Eselon Tahun 2020**

| No | Eselon        | Laki-laki | Perempuan |
|----|---------------|-----------|-----------|
| 1  | Eselon II b   | 1         | -         |
| 2  | Eselon III a  | -         | -         |
| 3  | Eselon III b  | 3         | 1         |
| 4  | Eselon IV a   | 6         | 6         |
|    | <b>Jumlah</b> | <b>10</b> | <b>7</b>  |

*Sumber Data : DPMD Kab. Bone*

Berdasarkan Tabel diatas, Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone yang bereselon sebanyak 17 orang, terdiri dari 1 orang eselon II b

(Kepala Dinas) , Esalon III b 4 orang (Kepala Bidang) dan 12 orang Esalon IV a (Kepala Seksi).

#### **1.4 ISU STRATEGIS**

Isu Strategis yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yang dituangkan dalam Renja tahun 2020 adalah :

1. Masih kurangnya profesionalisme aparatur pemberdayaan masyarakat dan desa
2. Kurangnya kapasitas stakeholder dalam mengimplementasikan kebijakan pemberdayaan masyarakat dan desa
3. Belum optimalnya lembaga ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan ketahanan masyarakat
4. Kurangnya penguasaan teknologi tepat guna dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat
5. Modernisasi menyebabkan degrasi nilai –nilai budaya tradisional yang telah tumbuh dimasyarakat.

#### **1.5 INOVASI PELAYANAN PUBLIK**

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik, oleh karena itu berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa salah satu inovasi yang dikembangkan adalah Warkopp Desa.

Warkop Desa merupakan Wadah Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bertujuan untuk memberikan layanan atas permasalahan – permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.

## BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Tahun 2013-2020 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone 2013-2020. Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD selama 5 tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone.

#### 2.1.1 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH:

Mengacu kepada visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagai arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut.

Visi sebagai cara pandang jauh ke depan tentang kemana Pemerintah Kabupaten akan diarahkan sebagaimana harapan yang akan dicapai pada akhir periode 2018 – 2023 Bupati dan wakil Bupati terpilih.

Adapun Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone 2018-2023 dengan mengacu kepada Visi RPJPD Kabupaten Bone 2005-2025 dan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 adalah :

#### **“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”**

Rumusan visi di atas mencakup tiga pokok visi yakni “Masyarakat Bone yang Religius”, “Masyarakat Bone yang Berdaya Saing”, dan “Masyarakat Bone yang Sejahtera”. Makna dari ketiga pokok visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Masyarakat Bone yang Mandiri**, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerjasamadengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.



2. **Masyarakat Bone yang Berdaya Saing**, dapat diartikan sebagai terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompetitif yang berbasis sumberdaya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional.
3. **Masyarakat Bone yang Sejahtera**, mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mewujudkan visi jangka Menengah Kabupaten Bone tahun 2018 -2023 maka dirumuskan 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Bone, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Berkaitan dengan misi tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone menjalankan program dan kegiatan pada Misi 1, 2, 3, 4 dan 6 sebagai berikut :

| VISI: MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA                                      |  |  |  |
|--|--|--|--|
| TUJUAN   | SASARAN  | STRATEGI   | KEBIJAKAN  |
| Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja   | <b>MISI 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)</b> |  |  |
|  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan DPMD   | Mengoptimalkan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  | Peningkatan Kapasitas dan Penguatan sumber daya aparat pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  |
|  | Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan lembaga Kemasyarakatan desa dengan dukungan partisipasi masyarakat           | Mengoptimalkan peran aparatur pemerintah desa, pemberdayaan lembaga dan masyarakat desa dalam pengawasan pembangunan di desa   | Penguatan sumber daya aparat pemerintah desa, lembaga pemberdayaan dan masyarakat desa serta pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa   |
| Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Mendukung kesejahteraan masyarakat Desa | <b>MISI 2 : Mengembangkan kemandirian ekonomi masyarakat dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat</b>               |  |  |
|  | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat desa melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan peningkatan lembaga ekonomi masyarakat di Desa</li> <li>2. Pengembangan kerjasama antara pemerintah daerah, pemerintah desa dan pelaku dunia usaha</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan dan penguatan BUMDES di setiap Desa, dan menyusun dokumen perencanaan kawasan pedesaan</li> <li>2. Menciptakan proses pelayanan publik yang efektif dan efisien yang mendukung peningkatan kerjasama di desa.</li> </ol> |
|  | <b>MISI 3 : Meningkatkan akses, pemetaan dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya</b>     |  |  |
|  | Mengoptimalkan pengembangan pelayanan posyandu terintegrasi di desa  | Mengoptimalkan pengembangan pelayan posyandu terintegrasi di desa  | Menyusun regulasi daerah dalam bentuk surat keputusan pokjanal posyandu terintegrasi tingkat kabupaten   |
|  | <b>MISI 4 : Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan</b>                       |  |  |
|  | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat desa melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat                                     | Pengembangan Kawasan Perdesaan   | Menyusun dokumen perencanaan kawasan perdesaan.  |
|  | <b>MISI 6 : Meningkatnya Budaya Politik, Penegakan Hukum dan Seni Budaya dalam Kemajemukan Masyarakat</b>              |  |  |
|  | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat desa melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat                                     | Mengoptimalkan peran lembaga adat yang ada di desa   | Mendorong terbentuknya lembaga adat di setiap desa   |

### 2.1.2 TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun serta Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini:

Adapun Tujuan yang ingin dicapai dalam jangka menengah (5 tahun) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Kabupaten Bone yang didasarkan pada Misi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

| TUJUAN   | INDIKATOR  | TARGET AKHIR RENSTRA |
|--|--|----------------------|
| 1  | 2  | 5                    |
| Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja   | Predikat Nilai SAKIP oleh APIP   | BB                   |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Mendukung Kesejahteraan Masyarakat Desa | Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat           | 100                  |
|  | Persentase desa yang menerapkan asa transparansi dalam pengelolaan keuangan desa | 100                  |
|  | Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahn desa yang baik              | 100                  |
|  | Persentase LPM aktif   | 100                  |
|  | Persentase LPM berprestasi   | 12,5                 |
|  | Persentase Lembaga Adat Aktif  | 100                  |
|  | Persentase PKK Aktif   | 100                  |
|  | Rata-rata JUmlah Kelompok BInaan PKK   | 100                  |
|  | Persentase Posyandu Aktif  | 100                  |
|  | Persentase peningkatan jumlah Bumdes Aktif                                       | 100                  |
|  | Persentase Desa yang menerapkan Teknologi Tepat Guna (TTG)                       | 100                  |

### 2.1.3 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

| TUJUAN   | INDIKATOR  | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET AKHIR RENSTRA |
|--|--|--------|--------------|----------------------|
| 1  | 2  | 3      | 4            | 5                    |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan DPMD   | Predikat Nilai SAKIP oleh APIP   |        | C            | BB                   |
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan lembaga Kemasyarakatan desa dengan dukungan partisipasi masyarakat | Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat           | %      | 85           | 100                  |
|  | Persentase desa yang menerapkan asa transparansi dalam pengelolaan keuangan desa | %      | 60           | 100                  |
|  | Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahn desa yang baik              | %      | 85           | 100                  |
|  | Persentase LPM aktif   | %      | 97           | 100                  |
|  | Persentase LPM berprestasi   | %      | 6,7          | 12,5                 |
|  | Persentase Lembaga Adat Aktif  | %      | 20           | 100                  |
|  | Persentase PKK Aktif   | %      | 100          | 100                  |
|  | Rata-rata JUmlah Kelompok BInaan PKK   | %      | 100          | 100                  |
| Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Desa melalui Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat                   | Persentase Posyandu Aktif  | %      | 100          | 100                  |
|  | Persentase peningkatan jumlah Bumdes Aktif                                       | %      | 92           | 100                  |
|  | Persentase Desa yang menerapkan Teknologi Tepat Guna (TTG)                       | %      | 50           | 100                  |

## 2.1.5 PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka untuk mencapainya perlu dijabarkan secara sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 2.3  
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020

| SASARAN  | PROGRAM PENDUKUNG  |
|--|--|
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan DPMD   | Pelayanan Administrasi Perkantoran   |
|  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |
|  | Program Peningkatan Disiplin Aparatur  |
|  | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan lembaga Kemasyarakatan desa dengan dukungan partisipasi masyarakat | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan                            |
|  | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa                |
|  | Program Pembinaan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa                           |
|  | Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan                                |
|  | Pembinaan Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset Desa                    |
|  | Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat                                       |
|  | Program Peningkatan Perkembangan Desa dan Kelurahan                            |
| Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Desa melalui Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat                   | Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa                                      |

## 2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2020 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2020, IKU dan APBD. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. telah menetapkan PK sebagai berikut:

Tabel 2.4

### Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2020

| TUJUAN   | INDIKATOR  | SATUAN   | TARGET |
|--|--|----------|--------|
| 1  | 2  | 3        | 4      |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan DPMD   | Predikat Nilai SAKIP oleh APIP   | Predikat | B      |
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan lembaga Kemasyarakatan desa dengan dukungan partisipasi masyarakat | Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat           | %        | 93     |
|  | Persentase desa yang menerapkan asa transparansi dalam pengelolaan keuangan desa | %        | 70     |
|  | Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahn desa yang baik              | %        | 92     |
|  | Persentase LPM aktif   | %        | 100    |
|  | Persentase LPM berprestasi   | %        | 9,10   |
|  | Persentase Lembaga Adat Aktif  | %        | 60     |
|  | Persentase PKK Aktif   | %        | 100    |
|  | Rata-rata JUmlah Kelompok BInaan PKK   | %        | 100    |
|  | Persentase Posyandu Aktif  | %        | 100    |
| Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Desa melalui Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat                   | Persentase peningkatan jumlah Bumdes Aktif                                       | %        | 100    |
|  | Persentase Desa yang menerapkan Teknologi Tepat Guna (TTG)                       | %        | 100    |

## 2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel 2.5  
IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

| SASARAN  | INDIKATOR KINERJA UTAMA   | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN  | SUMBER DATA |
|--|---|--------|--|-------------|
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan lembaga Kemasyarakatan desa dengan dukungan partisipasi masyarakat | Persentase Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat                  | %      | $\frac{\text{Jumlah Swadaya masyarakat mendukung program pemberdayaan masyarakat}}{\text{Total Program Pemberdayaan Masyarakat}} \times 100$ | Rekap Data  |
|  | Persentase desa yang telah menerapkan asas transparansi dalam pengelolaan keuangan desa | %      | $\frac{\text{Jumlah Desa yg memasang Media Transparansi}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100$  | Rekap Data  |
|  | Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik                    | %      | $\frac{\text{Jumlah Kantor Pemerintah Desa yang baik}}{\text{Jumlah seluruh Kantor Pemerintah}} \times 100$                                  | Rekap Data  |
|  | Persentase LPM Aktif  | %      | $\frac{\text{Jumlah LPM Aktif}}{\text{Jumlah LPM}} \times 100$   | Rekap Data  |
|  | Persentase LPM Berprestasi  | %      | $\frac{\text{Jumlah LPM Aktif}}{\text{Jumlah LPM}} \times 100$   | Rekap Data  |
|  | Persentase Lembaga Adat aktif   | %      | $\frac{\text{Jumlah Lembaga Adat Aktif}}{\text{Jumlah Lembaga Adat}} \times 100$   | Rekap Data  |
|  | Persentase PKK Aktif  | %      | $\frac{\text{Jumlah PKK Aktif}}{\text{Jumlah PKK}} \times 100$   | Rekap Data  |
|  | Persentase Kelompok Binaan PKK Aktif  | %      | $\frac{\text{Jumlah Kelompok Binaan PKK Aktif}}{\text{Jumlah Kelompok Binaan}} \times 100$   | Rekap Data  |
|  | Persentase Posyandu Aktif   | %      | $\frac{\text{Jumlah Posyandu Aktif}}{\text{Jumlah Posyandu}} \times 100$   | Rekap Data  |
| Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat desa melalui pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat                   | Persentase peningkatan jumlah bumdes yang aktif   | %      | $\frac{\text{Jumlah BUMDES Aktif}}{\text{Jumlah BUMDES}} \times 100$   | Rekap Data  |
|  | % desa yang menerapkan teknologi tepat guna (TTG)                                       | %      | $\frac{\text{Jumlah Desa yang menerapkan TTG}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100$   | Rekap Data  |



## 2.4 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar **Rp. 7.663.841.353,00** yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6  
Rencana Belanja DPMD Kabupaten Bone TA 2020

| No            | Uraian                 | Rencana (Rp)            | %          |
|---------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1             | Belanja Tidak Langsung | 3.003.841.353,00        | 39         |
| 2             | Belanja Langsung       | 4.660.000.000,00        | 61         |
| <b>Jumlah</b> |                        | <b>7.663.841.353,00</b> | <b>100</b> |

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7  
Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2020

| SASARAN  | INDIKATOR                      | PROGRAM   | KEGIATAN  | ANGGARAN    | % ANGGARAN |
|--|--------------------------------|---|---|-------------|------------|
| 1  | 2                              | 3   | 4   | 5           | 6          |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan DPMD | Predikat Nilai Sakip Oleh APIP | Pelayanan Administrasi Perkantoran                | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik              | 20,000,000  | 0,43%      |
|  |                                |   | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                               | 197,203,200 | 4,23%      |
|  |                                |   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            | 12,000,000  | 0.26%      |
|  |                                |   | Rapat-rapat Koordinasi dan Koonsultasi Dalam daerah dan Luar Daerah | 200,000,000 | 4,29%      |
|  |                                |   | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran                                | 131,090,300 | 2,81%      |
|  |                                | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                                   | 38,350,000  | 0,82%      |
|  |                                |   | Pengadaan Mebeluer  | 36,000,000  | 0,77%      |

| SASARAN  | INDIKATOR  | PROGRAM  | KEGIATAN   | ANGGARAN    | % ANGGARAN |
|--|--|--|--|-------------|------------|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5           | 6          |
|  |  |  | Pemeliharaan Rutin.Berkala Gedung Kantor   | 23,376,270  | 0,50%      |
|  |  |  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                   | 143,500,000 | 3.08%      |
|  |  |  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor                                    | 15,460,000  | 0.33%      |
|  |  |  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor                                       | 20,000,000  | 0.43%      |
|  |  | Program Peningkatan Disiplin Aparatur  | Pengadaan Pakaian Dinas PNS Berserta Kelengkapannya                                      | 17,000,000  | 0.36%      |
|  |  | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Penyusunan Rencana Perangkat Daerah  | 82,710,900  | 1,77%      |
|  |  |  | Pengelolaan Website Perangkat Daerah   | 37,000,000  | 0,79%      |
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan lembaga Kemasyarakatan desa dengan dukungan partisipasi masyarakat | Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan                            | Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Perdesaan dalam Penerapan TTG Penyelenggaraan Gelar TTG | 130,800,000 | 2,81%      |
|  | Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerinthan desa yang baik    |  | Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Desa  | 52,720,000  | 1,13%      |
|  | Persentase LPM aktif   |  | Rapat Koordinasi Pendamping Desa   | 204,280,000 | 4,38%      |
|  |  |  | Pembinaan, Monitoring, Evaluasi Perencanaan Desa   | 69,060,000  | 1,48%      |
|  |  | Program Peningkatan Partisipasi  | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan   | 45,600,000  | 0,98%      |
|  |  |  |  |             |            |

| SASARAN                               | INDIKATOR   | PROGRAM   | KEGIATAN  | ANGGARAN    | % ANGGARAN |
|---------------------------------------|---|---|---|-------------|------------|
| 1                                     | 2   | 3   | 4   | 5           | 6          |
|                                       |   | Masyarakat dalam membangun desa                             | Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu   | 386,532,500 | 8,29%      |
|                                       |   |   | Pengukuhan Anggota Badan Permusyawaratan Desa ( BPD )                     | 82,560,000  | 1,77%      |
|                                       |   |   | Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa   | 100,220,000 | 2,15%      |
|                                       |   | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa      | Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa | 247,270,000 | 5,31%      |
|                                       |   |   | Monitoring Evaluasi Kerjasama   | 36,015,000  | 0,77%      |
|                                       | Persentase desa yang menerapkan asas transparansi dalam pengelolaan keuangan desa | Pembinaan Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset Desa | Pembinaan Pengelolaan Keuangan desa dan Aset Desa                         | 302,000,000 | 6,48%      |
|                                       |   |   | Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa                                  | 75,745,000  | 1,63%      |
|                                       |   | Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat                    | Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa                  | 56,180,000  | 1,21%      |
|                                       |   | Program Peningkatan Perkembangan Desa dan Kelurahan         | Evaluasi dan Lomba Desa dan Kelurahan                                     | 296,345,000 | 6,36%      |
|                                       | Persentase PKK Aktif  | Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan             | Sarasehan Penguatan TP. PKK Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten       | 200,000,000 | 4,29%      |
|                                       | Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK  |   | Pelatihan Kader Posyandu di Desa  | 200,000,000 | 4,29%      |
|                                       | Persentase Posyandu Aktif   |   | Pelatihan MC Bagi Kader PKK   | 62,151,830  | 1,33%      |
|                                       | Persentase Lembaga Adat Aktif   |   | Bimtek Pemberdayaan Perempuan Perdesaan dalam membangun desa              | 147,280,000 | 3,16%      |
|                                       |   |   | Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan pada Hari Kesatuan Gerak PKK   | 200,000,000 | 4,29%      |
|                                       |   |   |   |             |            |
| Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat | Persentase peningkatan jumlah   | Program Pengembangan  | Pembinaan, Evaluasi dan Publikasi Potensi Ekonomi Kawasan                 | 139,100,000 | 2,98%      |

| SASARAN  | INDIKATOR         | PROGRAM              | KEGIATAN                                       | ANGGARAN      | % ANGGARAN |
|--|-------------------|----------------------|--|---------------|------------|
| 1  | 2                 | 3                    | 4  | 5             | 6          |
| Desa melalui Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat | bumdes yang aktif | Lembaga Ekonomi Desa | Perdesaan Kabupaten Bone                       |               |            |
|  |                   |                      | Pembinaan Asosiasi BUMDES Kab. Bone            | 147,250,000   | 3,16%      |
|  |                   |                      | Evaluasi dan Pembinaan Penyertaan Modal Bumdes | 505,200,000   | 10,84%     |
| JUMLAH   |                   |                      |  | 4,660,000,000 |            |

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar Rp 4,660,000,000,00 dengan persentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan sebesar Rp. 809.431.830.000,- atau sebesar 17,37%. Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah sasaran Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa, yaitu sebesar Rp. 791.550.000,- atau sebesar 16,99%. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar Rp. 17.000.000, atau 0,36 % dari total anggaran belanja langsung.

Akibat Pandemi Covid 19, maka Pagu Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengalami Refocusing Anggaran dari anggaran pokok sebesar Rp. 7.663.841.353 menjadi Rp. 6.070.536.202 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.

Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung pada Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6  
Rencana Belanja DPMD Kabupaten Bone TA 2020

| No            | Uraian                 | Rencana (Rp)            | %          |
|---------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1             | Belanja Tidak Langsung | 3.210.536.202,00        | 53         |
| 2             | Belanja Langsung       | 2.860.000.000,00        | 47         |
| <b>Jumlah</b> |                        | <b>6.070.536.202,00</b> | <b>100</b> |

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

| SASARAN  | INDIKATOR                      | PROGRAM   | KEGIATAN  | ANGGARAN    | % ANGGARAN |
|--|--------------------------------|---|---|-------------|------------|
| 1  | 2                              | 3   | 4   | 5           | 6          |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan DPMD | Predikat Nilai Sakip Oleh APIP | Pelayanan Administrasi Perkantoran                | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik              | 15,000,000  | 0,52%      |
|  |                                |   | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                               | 200,082,400 | 7,00%      |
|  |                                |   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            | 12,000,000  | 0.42%      |
|  |                                |   | Rapat-rapat Koordinasi dan Koonsultasi Dalam daerah dan Luar Daerah | 141,117,630 | 4,93%      |
|  |                                |   | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran                                | 115,050,300 | 4,02%      |
|  |                                | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                                   | 45,350,000  | 1,59%      |
|  |                                |   | Pengadaan Mebeluer  | 36,000,000  | 1,26%      |
|  |                                |   | Pemeliharaan Rutin.Berkala Gedung Kantor                            | 61,101,270  | 2.14%      |
|  |                                |   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional              | 110,500,000 | 3.86%      |
|  |                                |   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor               | 15,460,000  | 0.54%      |
|  |                                |   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor                  | 20,000,000  | 0.70%      |
|  |                                | Program Peningkatan Disiplin Aparatur             | Pengadaan Pakaian Dinas PNS Berserta Kelengkapannya                 | 17,000,000  | 0.59%      |
|  |                                | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan | Penyusunan Rencana Pernagkat Daerah                                 | 69,710,900  | 2.44%      |

| SASARAN  | INDIKATOR   | PROGRAM   | KEGIATAN  | ANGGARAN    | % ANGGARAN |
|--|---|---|---|-------------|------------|
| 1  | 2   | 3   | 4   | 5           | 6          |
|  |   | Capaian Kinerja dan Keuangan                                    |   |             |            |
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan lembaga Kemasyarakatan desa dengan dukungan partisipasi masyarakat | Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat            | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan             | Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Desa                                     | 22,720,000  | 0.79%      |
|  | Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerinthan desa yang baik               |   | Rapat Koordinasi Pendamping Desa  | 106,320,000 | 3.72%      |
|  | Persentase LPM aktif  |   | Pembinaan, Monitoring, Evaluasi Perencanaan Desa                          | 24,000,000  | 0.84%      |
|  | Persentase desa yang menerapkan asas transparansi dalam pengelolaan keuangan desa | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan  | 39,600,000  | 1.38%      |
|  |   |   | Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu   | 19,824,000  | 0.69%      |
|  |   | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa          | Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa | 229,670,000 | 8.03%      |
|  |   |   | Monitoring Evaluasi Kerjasama   | 23,000,000  | 0.80%      |
|  |   | Pembinaan Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset Desa     | Pembinaan Pengelolaan Keuangan desa dan Aset Desa                         | 184,718,500 | 6.46%      |
|  |   |   | Pelatihan Tim Verifikasi APBDes dan APBDes Perubahan Tingkat Kecamatan    | 33,570,000  | 1.17%      |
|  |   |   | Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa                                  | 129,940,000 | 4.54%      |
|  |   | Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat                        | Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa                  | 56,180,000  | 1.96%      |
|  |   | Program Peningkatan Perkembangan                                | Evaluasi dan Lomba Desa dan Kelurahan                                     | 37,370,000  | 1.31%      |

| SASARAN  | INDIKATOR                                       | PROGRAM   | KEGIATAN  | ANGGARAN      | % ANGGARAN |
|--|---|---|---|---------------|------------|
| 1  | 2   | 3   | 4   | 5             | 6          |
|  |   | Desa dan Kelurahan                              |   |               |            |
|  | Persentase PKK Aktif                            | Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan | Sarasehan Penguatan TP. PKK Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten                   | 106,620,000   | 3.73%      |
|  | Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK            |   | Pelatihan Kader Posyandu di Desa  | 50,360,000    | 1.76%      |
|  | Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK            |   | Sosialisasi dan Pembinaan Kelompok Perempuan untuk turut serta dalam pembangunan desa | 100,000,000   | 3.50%      |
|  | Persentase Lembaga Adat Aktif                   |   | Bimtek Pemberdayaan Perempuan Perdesaan dalam membangun desa                          | 147,280,000   | 5.15%      |
|  | Persentase Posyandu Aktif                       |   |   |               |            |
|  |   |   |   |               |            |
| Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Desa melalui Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat | Persentase peningkatan jumlah bumdes yang aktif | Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa       | Pembinaan Asosiasi BUMDES Kab. Bone   | 147,250,000   | 5.15%      |
|  |   |   | Evaluasi dan Pembinaan Penyertaan Modal Bumdes  | 543,200,000   | 18.99%     |
| JUMLAH   |   |   |   | 2,860,000,000 |            |

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar Rp 2,860,000,000,00 dengan persentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa sebesar Rp. 690.450.000,- atau sebesar 24,147%. Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah sasaran Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan, yaitu sebesar Rp. 404.260.000,- atau sebesar 14,13%. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran Program Peningkatan Perekembangan Desa dan Kelurahan sebesar Rp. 37.370.000.000, atau 1,31 % dari total anggaran belanja langsung.



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan tahapan untuk melihat capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran. Sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pengukuran kinerja merupakan tahapan penting untuk membandingkan antara target dalam penetapan kinerja dengan hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil pengukuran kinerja yang dituangkan ke dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun untuk mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan mengukur capaian atas sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja dengan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses mencatat, dan mengukur pencapaian sasaran, melalui hasil-hasil ataupun proses pelaksanaan suatu kegiatan. Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi N Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam proses pengukuran kinerja menitikberatkan pada upaya pencapaian hasil kerja atau outcome, tidak hanya pada penggunaan sumber dana. Indikator kinerja outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka tertentu.

### 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal dengan pendekatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

Tabel 3.1.  
Skala Pengukuran Ordinal

| NO | INTERVAL NILAI<br>REALISASI KINERJA | KRITERIA PENILAIAN<br>REALISASI KINERJA |
|----|-------------------------------------|---|
| 1  | >100 %                              | Baik Sekali                             |
| 2  | 76 % ≤ 100%                         | Baik                                    |
| 3  | 66 % ≤ 75 %                         | Cukup                                   |
| 4  | 51 % ≤ 65 %                         | Kurang                                  |
| 5  | ≤ 50%                               | Sangat Kurang                           |

Secara umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Tahun 2018–2023. Dalam Renstra terdapat 3 sasaran dengan 12 indikator sasaran. Sasaran 1 terdapat 1 indikator kinerja, Sasaran 2 terdapat 9 indikator kinerja, Sasaran 3 terdapat 2 indikator.

Tabel 3.2  
Pencapaian Indikator Sasaran

| No | Sasaran  | Jumlah Indikator | Pencapaian Indikator Sasaran |
|----|--|------------------|------------------------------|
| 1. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone              | 1                | BAIK = 100%                  |
| 2. | Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan desa dengan dukungan partisipasi masyarakat | 9                | BAIK SEKALI = 101%           |

| No | Sasaran  | Jumlah Indikator | Pencapaian Indikator Sasaran |
|----|--|------------------|------------------------------|
| 3. | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Desa melalui Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat | 2                | BAIK = 100%                  |
|    | JUMLAH   | 12               | BAIK = 100%                  |

### 3.1.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2020

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat diquantifikasi dan diukur. Rincian tingkat capaian sasaran yang telah ditetapkan dengan melihat tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**Capaian Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020.**

| NO. | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR   | TARGET | REALISASI | %     |
|-----|--|---|--------|-----------|-------|
| 1   | 2  | 3   | 4      | 5         | 6     |
| 1   | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan DPMD   | Predikat Nilai SAKIP oleh APIP  | B      | B         | 100%  |
| 2   | Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan lembaga Kemasyarakatan desa dengan dukungan partisipasi masyarakat | Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat            | 93 %   | 93 %      | 100%  |
|     |  | Persentase desa yang menerapkan asas transparansi dalam pengelolaan keuangan desa | 70 %   | 100%      | 142%  |
|     |  | Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik                | 92 %   | 92%       | 100 % |
|     |  | Persentase LPM aktif  | 100 %  | 100 %     | 100 % |
|     |  | Persentase LPM berprestasi  | 9,10 % | 0 %       | 0%    |
|     |  | Persentase Lembaga Adat Aktif   | 60 %   | 100%      | 166%  |
|     |  | Persentase PKK Aktif  | 100 %  | 100%      | 100%  |
|     |  | Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK  | 100 %  | 100%      | 100%  |
|     |  | Persentase Posyandu Aktif   | 100 %  | 100%      | 100%  |
| 3   | Meningkatnya Kesejahteraan   | Persentase peningkatan jumlah Bumdes Aktif  | 100 %  | 100%      | 100%  |

| NO. | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR  | TARGET | REALISASI | %    |
|-----|---|--|--------|-----------|------|
| 1   | 2   | 3  | 4      | 5         | 6    |
|     | Masyarakat Desa melalui Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat | Persentase Desa yang menerapkan Teknologi Tepat Guna (TTG) | 100 %  | 100%      | 100% |

Dari 3 sasaran dengan 12 indikator kinerja utama sasaran dapat dijelaskan pencapaian indikator sasaran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.4

Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

| No.              | Kategori      | Jumlah Indikator Sasaran | Persentase (%) |
|------------------|---------------|--------------------------|----------------|
| <b>Sasaran 1</b> |               |                          |                |
| 1.               | Baik Sekali   |                          |                |
| 2.               | Baik          | 1                        | 100%           |
| 3.               | Cukup         |                          |                |
| 4.               | Kurang        |                          |                |
| 5.               | Sangat Kurang |                          |                |
|                  | <b>Jumlah</b> | <b>1</b>                 | <b>100%</b>    |
| <b>Sasaran 2</b> |               |                          |                |
| 1.               | Baik Sekali   | 2                        | 142%,166%      |
| 2.               | Baik          | 6                        | 100 %          |
| 3.               | Cukup         |                          |                |
| 4.               | Kurang        |                          |                |
| 5.               | Sangat Kurang | 1                        | 0 %            |
|                  | <b>Jumlah</b> | <b>9</b>                 | <b>101%</b>    |
| <b>Sasaran 3</b> |               |                          |                |
| 1.               | Baik Sekali   |                          |                |
| 2.               | Baik          | 2                        | 100%           |
| 3.               | Cukup         |                          |                |
| 4.               | Kurang        |                          |                |
| 5.               | Sangat Kurang |                          | 100%           |
|                  | <b>Jumlah</b> | <b>2</b>                 | <b>100%</b>    |

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 3 sasaran dengan 12 indikator kinerja, diketahui bahwa 2 indikator sasaran atau 142% dan 166% Baik Sekali, 11 indikator sasaran atau 100 % Baik, 1 indikator sasaran atau  $\leq 50\%$  sangat kurang.

### 3.1.2 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2020 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan, maka untuk mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama dan RPJMD instansi maka capaian Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2020 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dijelaskan melalui uraian tiap sasaran berikut di bawah ini:

#### A. Sasaran 1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan DPMD

- **Strategi**

Mencapai target predikat evaluasi SAKIP oleh APIP

- **Kebijakan**

Peningkatan Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone

#### a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran 1

Tabel 3.5 Indikator Kinerja 1

| No. | Indikator Kinerja                              | Target 2020 | Realisasi 2020 | Capaian Kinerja |
|-----|--|-------------|----------------|-----------------|
| 1.  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan DPMD | B           | B              | 100%            |

Berdasarkan Tabel tersebut di atas, diketahui bahwa realisasi dan target pada indikator kinerja utama yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan capaian **100%** (*telah mencapai target*) yang ditetapkan. Realisasi pada tahun 2020 mencapai predikat B dari hasil evaluasi SAKIP terhadap APIP dari target B dengan persentase capaian 100% capaian ini dikategorikan (**baik**).

**b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya Sasaran 1**

**Tabel 3.6**

**Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan DPMD**

| No. | Indikator Kinerja                 | Capaian |      |
|-----|-----------------------------------|---------|------|
|     |                                   | 2019    | 2020 |
| 1   | Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP | B       | B    |

Berdasarkan Tabel tersebut di atas, bahwa capaian indikator kinerja urusan penunjang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Berkategori Baik

**c. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah ( RENSTRA )**

Berdasarkan target Renstra hal ini sudah tercapai dimana realisasi kinerja Tahun 2020 memperoleh nilai SAKIP oleh APIP dengan Predikat B

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta solusi yang telah dilakukan**

➤ ***Predikat Nilai Sakip oleh APIP***

Keberhasilan dalam pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah daerah dapat dilihat dari pencapaian nilai SAKIP. Pencapaian nilai SAKIP berdasarkan predikat yang diberikan oleh APIP pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone berhasil mencapai nilai B sesuai dengan target yang ditetapkan B, keberhasilan pencapaian predikat ini disebabkan oleh adanya Capaian realisasi sesuai dengan target berdasarkan indikator Kinerja Utama.

**e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target indikator kinerja tahun 2020 lebih banyak pada dukungan sumberdaya penganggaran dan dukungan sumberdaya manusia baik dalam lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maupun Stakeholders di luar Dinas Pemberdayaan Masyarakat seperti Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa,

Tenaga Ahli Pemberdayaan dan dukungan dari Infrastruktur Desa mulai dari Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Aparatur Desa Lainnya.

**f. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja**

Ada beberapa Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, Program Peningkatan Disiplin Aparatur dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Keempat Program ini yang sangat menunjang pencapaian Kinerja karena sangat terkait dengan Peningkatan SDM Aparatur, Sarana dan Prasarana serta dukungan Pelaporan Kinerja.

**g. Permasalahan dan Alternatif Solusi**

Beberapa hal yang berpengaruh sehingga pencapaian kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat tahun 2020 belum tercapai secara optimal disebabkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kurangnya Tingkat profesionalisme sumber daya manusia aparatur;
2. Koordinasi antar pejabat struktural kurang terjalin dengan baik;
3. Sarana dan Prasarana Perkantoran belum tertata dengan baik yang mengakibatkan suasana bekerja kurang baik;
4. Tidak Adanya Pemberian Reward/penghargaan Kepada Aparat yang berprestasi;

Oleh karena itu untuk tahun yang akan datang diupayakan langkah-langkah antisipatif sebagai berikut :

1. Perlunya upaya Peningkatan sumber daya manusia dalam upaya pemahaman terhadap tipoksi masing – masing ;
2. Intensitas rapat koordinasi baik secara internal maupun eksternal perlu di tingkatkan;
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana penunjang untuk mendukung tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
4. Perlunya Pemberian Reward/penghargaan bagi Aparat yang berkinerja baik

**B. Sasaran 2: Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan lembaga Kemasyarakatan desa dengan dukungan partisipasi masyarakat**

• **Strategi**

- a. Pelibatan masyarakat dalam pembangunan Desa
- b. Penerapan asas transparansi dalam pengelolaan keuangan desa



- c. Peningkatan cakupan sarana dan prasarana kantor pemerintah desa yang baik
- d. Peningkatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa ( LPM, PKK, Posyandu dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya)
- **Kebijakan**
  - a. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di desa
  - b. Penyelenggaraan Akuntabilitas Keuangan Desa yang Berbasis Aplikasi
  - c. Penyelenggaraan layanan pemerintahan desa yang berbasis kompetensi
  - d. Optimalisasi peran Lembaga Masyarakat Desa dalam penyelenggaraan pembangunan di desa.

**a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran 2**

Tabel 3.7 Indikator Kinerja 1

| No. | Indikator Kinerja   | Target 2020 | Realisasi 2020 | Capaian Kinerja |
|-----|---|-------------|----------------|-----------------|
| 1.  | Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat            | 93 %        | 93%            | 100%            |
| 2.  | Persentase desa yang menerapkan asas transparansi dalam pengelolaan keuangan desa | 70 %        | 100%           | 142%            |
| 3.  | Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahn desa yang baik               | 92 %        | 92%            | 100 %           |
| 4.  | Persentase LPM aktif  | 100 %       | 100 %          | 100 %           |
| 5.  | Persentase LPM berprestasi  | 9,10%       | 0 %            | 0 %             |
| 6.  | Persentase Lembaga Adat Aktif   | 60 %        | 100 %          | 166%            |
| 7.  | Persentase PKK Aktif  | 100 %       | 100%           | 100%            |
| 8.  | Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK  | 100 %       | 100%           | 100%            |
| 9.  | Persentase Posyandu Aktif   | 100 %       | 100%           | 100%            |

Berdasarkan Tabel tersebut di atas, diketahui bahwa realisasi dan target pada sasaran 2 Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan lembaga Kemasyarakatan desa dengan dukungan partisipasi masyarakat terdapat 9 indikator dengan capaian masing-masing indikator sebagai berikut :

- a. Indikator Persentase Swadaya masyarakat swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat telah mencapai target dengan capaian

100%. Realisasi pada tahun 2020 telah mencapai 93 % sesuai dengan target, capaian ini di kategorikan (*baik*).

- b. Indikator Persentase desa yang menerapkan asas transparansi dalam pengelolaan keuangan desa tahun 2020 telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2020 sebesar 70 % dan telah mencapai 142%, atau melampaui target sebesar 30 %. Capaian ini dapat dikategorikan (*sangat baik*)
- c. Indikator Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang baik telah melampaui target tahun 2020 sebesar 92% dimana realisasi yang dicapai pada tahun 2020 sebesar 92% atau mencapai 100%. Capaian ini dikategorikan (*baik*)
- d. Indikator Persentase LPM Aktif berhasil mencapai target sebesar 100% sesuai dengan target pada tahun 2020 dengan capaian ini di kategorikan (*baik*).
- e. Indikator Persentase LPM berprestasi dengan target sebesar 9,10% dengan capaian 0% Target tidak terpenuhi karena pada tahun 2020 adanya refocussing dan realokasi anggaran, dengan capaian ini kurang dari 50% di kategorikan (*Sangat Kurang*).
- f. Indikator Persentase Lembaga Adat Aktif dengan target 60% dengan capaian 100% tahun 2020 telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2020 sebesar 60 % dan telah mencapai 166%, atau melampaui target sebesar 40 %. Capaian ini dapat dikategorikan (*sangat baik*)
- g. Indikator Persentase PKK Aktif Realisasi pada tahun 2020 telah mencapai 100 % sesuai dengan target pada Tahun 2020, capaian ini di kategorikan (*baik*).
- h. Indikator Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK telah mencapai target sebesar 100% sesuai dengan target tahun 2020, capaian ini di kategorikan (*baik*).
- i. Indikator Persentase Posyandu Aktif mencapai target sebesar 100% sesuai dengan target tahun 2020, capaian ini di kategorikan (*baik*).

**b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya**  
**Sasaran 2**

**Tabel 3.8**  
**Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya**  
**Pemberdayaan Masyarakat**

| No. | Indikator Kinerja   | Capaian |       |
|-----|---|---------|-------|
|     |   | 2019    | 2020  |
| 1   | Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat            | 87,3%   | 93%   |
| 2   | Persentase desa yang menerapkan asas transparansi dalam pengelolaan keuangan desa | 100%    | 100%  |
| 3   | Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik              | 88%     | 92%   |
| 4   | Persentase LPM aktif  | 100 %   | 100 % |
| 5   | Persentase LPM berprestasi  | 0 %     | 0 %   |
| 6   | Persentase Lembaga Adat Aktif   | 100 %   | 100 % |
| 7   | Persentase PKK Aktif  | 100%    | 100%  |
| 8   | Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK  | 100%    | 100%  |
| 9   | Persentase Posyandu Aktif   | 100%    | 100%  |

Berdasarkan Tabel tersebut di atas, bahwa capaian indikator kinerja pada sasaran 2 dengan 9 Indikator dengan rata-rata nilai capaian berkategori (**Baik**).

**c. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah ( RENSTRA )**

Berdasarkan Indikator Kinerja pada tabel perkembangan capaian indikator kinerja yang terdiri dari 9 indikator secara umum telah mencapai target sesuai dengan target pada Renstra DPMD. Hanya ada satu indikator kinerja yang tidak tercapai yaitu persentase LPM Berprestasi karena adanya refocussing dan realokasi anggaran, sehingga penilaian LPM tidak bisa dilaksanakan.

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta solusi yang telah dilakukan**

**a. Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat**

Swadaya masyarakat dilakukan untuk mengetahui potensi masyarakat desa dalam membangun daerahnya, seberapa besar swadaya dari masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya pembangunan yang dilaksanakan atas swadaya masyarakat

menunjukkan bahwa kalau masyarakat desa mampu membangun daerahnya sendiri. Berdasarkan tabel diatas mengenai peningkatan capaian swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan, terlihat bahwa capaian realisasi tahun 2020 sudah mencapai target sebagaimana yang diharapkan hal ini disebabkan pemerintah desa sudah melibatkan masyarakat secara penuh dalam kegiatan pemberdayaan seperti, pelaksanaan musrenbang desa yang hanya melibatkan sebagian kecil masyarakat yang ada di desa dan sangat jarang melibatkan kelompok masyarakat rentan , seperti masyarakat miskin, disabilitas, kelompok perempuan dan masyarakat termarginal lainnya.

***b. Persentase desa yang menerapkan asas transparansi dalam pengelolaan keuangan desa***

Persentase desa yang menerapkan asas transparansi dalam pengelolaan keuangan desa telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 70 % atau sebanyak 229 desa dimana capaian penerapan transparansi keuangan desa mencapai 100% atau 328 desa. Hal ini disebabkan karena pengelolaan keuangan desa, telah mempergunakan aplikasi siskeudes mulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Perencanaan dan Belanja Desa, hingga sampai kepada penyusunan dokumen pertanggungjawaban desa.

***c. Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik***

Keberhasilan capaian Cakupan Sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik mampu memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 92%. hal ini disebabkan adanya dukungan penganggaran alokasi dana desa untuk pembangunan, rehabilitasi sarana dan prasarana kantor desa. Dari 328 desa hanya 5 desa yang belum memiliki sarana dan prasarana perkantoran yang baik.

***d. Persentase LPM aktif***

Persentase LPM Aktif telah mencapai target 100 % atau mampu memenuhi target yang ditetapkan. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh besarnya pelibatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di desa, mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan.

***e. Persentase LPM berprestasi***

Persentase LPM berprestasi pada tahun 2020 tidak bergerak sama sekali (0%) yang disebabkan adanya refocusing dan realokasi anggaran, sehingga penilaian

terhadap LPM tidak dapat dilaksanakan.

***f. Persentase Lembaga Adat Aktif***

Persentase Lembaga Adat aktif tahun 2020 telah mencapai target sebesar 100% yang disebabkan adanya pembinaan masing-masing desa pada lembaga adat desa.

***g. Persentase PKK Aktif***

Persentase PKK Aktif tahun 2020 telah mencapai target sebesar 100% yang disebabkan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) untuk insentif dan pembinaan PKK di setiap desa dan pembinaan yang dilakukan Oleh Tim Penggerak PKK Kecamatan maupun Tim Penggerak PKK Kabupaten.

***h. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK***

Persentase PKK Aktif tahun 2020 telah mencapai target sebesar 100% yang disebabkan adanya pembinaan dari PKK masing-masing desa kepada kelompok Dasawisma dan Kelompok Binaan Lainnya dan pelatihan pembinaan PKK di tingkat Kabupaten

***i. Persentase Posyandu Aktif***

Persentase Posyandu aktif telah mencapai target sebesar 100% yang disebabkan adanya Insentif bagi Kader Posyandu dan Kader Kesehatan lainnya melalui penganggaran Dana Desa. Dan adanya peran serta aktif Tim Pokjanal Posyandu Tingkat Kabupaten dalam pemberian layanan di masing-masing posyandu.

**e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target indikator kinerja tahun 2020 lebih banyak pada dukungan sumberdaya penganggaran dan dukungan sumberdaya manusia baik dalam lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maupun Stakeholders di luar Dinas Pemberdayaan Masyarakat seperti Pendamping Profesional yang terdiri dari Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa, Tenaga Ahli Pemberdayaan dan dukungan dari Infrastruktur Desa mulai dari Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Aparatur Desa Lainnya.

**f. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja**

Dari keseluruhan program dan Kegiatan yang masuk dalam sasaran 2 sangat mendukung pencapaian kinerja urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat karena sangat terkait dengan sistem Pengelolaan Lembaga Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa serta Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat turut serta dalam membangun Desa.

**g. Permasalahan dan Alternatif Solusi**

Beberapa hal yang berpengaruh sehingga pencapaian kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat tahun 2020 belum tercapai secara optimal disebabkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kurangnya Kapasitas Aparat Pemerintah Desa dalam mengimplementasikan segala kebijakan baik dari pusat sampai ke desa yang terkait Pemberdayaan Masyarakat;
2. Aparat Pemerintah Desa kurang berkerja secara MAksimal;
3. Masih rendahnya Tingkat partisipasi Masyarakat dalam membangun desa mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, Pengawasan samapi peran dan Partisipasi;
4. Masih Perlunya Peningkatan Peran dan Partisipasi perempuan dalam Membangun Desa;
5. Pengelolaan Keuangan Desa Masih kurang memenuhi standar asas transparansi, akuntabel, Partisipatif dan demikratisasi;

Oleh karena itu untuk tahun yang akan datang diupayakan langkah-langkah antisipatif sebagai berikut :

1. Perlunya Sosilisasi Kepada Aparat Pemerintah Desa khususnya dalam penerapan Peraturan/Regulasi terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Perlunya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Aparat Pemerintah Desa yang lebih Terarah dan Terintegrasi yang melibatkan seluruh stakeholder;
3. Memaksimalkan fungsi dan peran lembaga kemasyarakatan Desa seperti PKK, Posyandu, Karang Taruna dan lain sebagainya dalam upaya membantu pemeritah desa;
4. Memaksimalkan fungsi dan Pemerintahan Kecamatan, para pendampingan profesional dalam melakukan pendampingan pada kegiatan pemberdayaan Masyarakat Desa.

**C. Sasaran 3: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Desa melalui Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat**

- **Strategi**

- a. Penerapan Inovasi Desa melalui BUMdes dan Bumdesma
- b. Penerapan Teknologi tepat guna melalui lembaga Ekonomi Masyarakat Desa.

- **Kebijakan**

- a. Optimalisasi Inovasi Desa dalam peningkatan ekonomi masyarakat melalui Bumdes dan Bumdesma
- b. Peningkatan jumlah desa yang menerapkan Teknologi Tepat Guna (TTG)

**a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran 3**

Tabel 3.9 Indikator Kinerja

| No. | Indikator Kinerja                                    | Target 2020 | Realisasi 2020 | Capaian Kinerja |
|-----|--|-------------|----------------|-----------------|
| 1.  | Persentase Peningkatan Jumlah BUMdes Aktif           | 100 %       | 100 %          | 100%            |
| 2.  | Persentase Desa yang menerapkan teknologi tepat guna | 100 %       | 100%           | 100%            |

Berdasarkan Tabel tersebut di atas, diketahui bahwa realisasi dan target pada sasaran 3 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Desa melalui Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat terdapat 2 indikator dengan capaian masing-masing indikator sebagai berikut :

- a. Indikator Persentase peningkatan Jumlah Bumdesa aktif telah mencapai 100% atau sebanyak 324 Bumdes dari 324 Bumdes , kategori capaian termasuk kedalam kategori (*baik*).
- b. Indikator Persentase desa yang menerapkan Teknolgi tepat guna (TTG) yang ditargetkan sebesar 100 % atau 328 Desa dan telah mencapai target 100%. Capaian ini dapat dikategorikan ( *baik* )

**b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya Sasaran 3**

**Tabel 3.10**  
**Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Desa melalui Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat**

| No. | Indikator Kinerja                                    | Capaian |      |
|-----|--|---------|------|
|     |  | 2019    | 2020 |
| 1   | Persentase Peningkatan Jumlah BUMdes Aktif           | 100%    | 100% |
| v2  | Persentase Desa yang menerapkan teknologi tepat guna | 100%    | 100% |

Berdasarkan Tabel tersebut di atas, bahwa capaian indikator kinerja pada sasaran 3 dengan indikator Persentase Peningkatan Jumlah Bumdes Aktif dengan capaian 100% pada tahun 2019 dan Tahun 2020 juga 100 %.

Sedangkan capaian persentase desa yang menerapkan teknologi tepat guna pada tahun 2019 sebesar 100% dan Tahun 2020 juga 100 %.

**c. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah ( RENSTRA )**

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020 dengan target kinerja jangka menengah (RENSTRA) sebagai berikut:

- 1) Realisasi Kinerja Tahun 2020 terkait Persentase peningkatan Jumlah Bumdes aktif yaitu 100% atau sebanyak 324 Bumdes dari 324 Bumdes dan sudah mencapai target pada Renstra DPMD sesuai tahun rencana.
- 2) Realisasi Kinerja Tahun 2020 terkait penerapan Teknolgi tepat guna (TTG) yaitu 100 % atau 328 Desa dan sudah mencapai target pada Renstra DPMD sesuai tahun berjalan.

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.**

**a. Persentase jumlah Bumdes aktif**

Dari 324 Bundes yang ada di Kabupaten Bone di Tahun 2020 semuanya aktif atau dengan kata lain jumlah Bumdes aktif sebesar 100% dan sudah memenuhi target yang sudah di tetapkan sebesar 100%, hal tersebut bisa tercapai karena



adalah kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bumdes di masing-masing desa yang dilakukan secara terus-menerus.

**b. Persentase desa yang menerapkan TTG**

Penerapan TTG telah terlaksana di 328 Desa dan sudah memenuhi target yang ditetapkan sebesar 100%. Hal ini dapat diwujudkan melalui Pembinaan dan Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna di Tingkat Kecamatan. Namun saat sekarang ini kecenderungan masyarakat untuk menggunakan teknologi modern semakin meningkat.

**e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target indikator kinerja tahun 2020 lebih banyak pada dukungan sumberdaya penganggaran dan dukungan sumberdaya manusia baik dalam lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maupun Stakeholders di luar Dinas Pemberdayaan Masyarakat seperti Pendamping Profesional yang terdiri dari Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa, Tenaga Ahli Pemberdayaan dan dukungan dari Pemerintah Desa.

**f. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja**

Program dan Kegiatan yang ada pada indikator sasaran 3 sangat mendukung pencapaian kinerja urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Khususnya pada Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa terutama dalam pencapaian Kinerja Bumdes ini karena adanya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bumdes masing-masing desa dan Penerapan TTG yang telah terlaksana di 328 Desa yang pencapaian Kinerjanya tidak terlepas dari adanya kegiatan Pembinaan dan Pembentukan Pos Pelayanan TTG.

**g. Permasalahan dan Alternatif Solusi**

Beberapa hal yang berpengaruh sehingga pencapaian kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat tahun 2020 belum tercapai secara optimal disebabkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dari Penyertaan Modal Pemerintah Desa melalui Dana Desa Ke BUMDES belum memberikan Kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Desa;
2. Unit Usaha yang dibentuk oleh BUMDES tidak berfungsi secara optimal;
3. BUMDES belum dikelola secara profesional;

Oleh karena itu untuk tahun yang akan datang diupayakan langkah-langkah antisipatif sebagai berikut :

1. Perlu ditingkatkan kegiatan monitoring, evaluasi dan Pembinaan
2. Perlu adanya kajian atau analisis terhadap potensi pengembangan usaha BUMDES sebelum menentukan jenis usaha;
3. Perlu dilakukan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia bagi pengurus BUMDES melalui Pelatihan, Bimtek dan Orientasi Lapangan sesuai dengan jenis Usaha yang dikelola BUMDES.

### 3.2 REALISASI ANGGARAN

#### 1. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran APBD yang dikelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 5.952.592.878,- (98,05%)

##### 1. Anggaran Kinerja :

|                          |     |                          |
|--------------------------|-----|--------------------------|
| - Belanja Tidak Langsung | Rp. | 3.139.864.028,- (97,79%) |
| - Belanja Langsung       | Rp. | 2.812.728.850,- (98,34%) |
| Jumlah                   | Rp. | 5.952.592.878,- (98,05%) |

#### 2. Pemanfaatan Anggaran

- a. Pemanfaatan anggaran yang bersumber dari anggaran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :

##### 1) Belanja Tidak Langsung

Realisasi anggaran belanja tidak langsung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 3.139.864.028,- (97,79%) yang diarahkan untuk pembiayaan gaji dan tunjangan PNS.

## 2) Belanja Langsung

Realisasi anggaran belanja langsung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 2.812.728.850,- (98,34%) dengan uraian sebagai berikut :

| SASARAN  | INDIKATOR                      | PROGRAM   | KEGIATAN  | ANGGARAN    |       | REALISASI   |        |
|--|--------------------------------|---|---|-------------|-------|-------------|--------|
|  |                                |   |   | JUMLAH      | %     | JUMLAH      | %      |
| 1  | 2                              | 3   | 4   | 5           | 6     | 7           | 8      |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan DPMD | Predikat Nilai Sakip Oleh APIP | Pelayanan Administrasi Perkantoran                | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik              | 15,000,000  | 0.52% | 15,000,000  | 100%   |
|  |                                |   | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                               | 200.082.400 | 7.00% | 199,190,863 | 99,55% |
|  |                                |   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            | 12,000,000  | 0.42% | 12,000,000  | 100%   |
|  |                                |   | Rapat-rapat Koordinasi dan Koonsultasi Dalam daerah dan Luar Daerah | 141.117.630 | 4.93% | 140,994.800 | 99.91% |
|  |                                |   | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran                                | 115.055.300 | 4.02% | 114.964.850 | 99.92% |
|  |                                | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                                   | 45.350.000  | 1.59% | 45.350.000  | 100%   |
|  |                                |   | Pengadaan Mebeluer  | 36.000.000  | 1,26% | 36.000.000  | 100%   |
|  |                                |   | Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor                            | 61.101.270  | 2,14% | 61.101.270  | 100%   |
|  |                                |   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional              | 110,500,000 | 3.86% | 110,500,000 | 100%   |
|  |                                |   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor               | 15,460,000  | 0.54% | 15,460,000  | 100%   |
|  |                                |   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor                  | 20.000.000  | 0.70% | 20.000.000  | 100%   |

| SASARAN  | INDIKATOR   | PROGRAM  | KEGIATAN  | ANGGARAN    |       | REALISASI   |        |
|--|---|--|---|-------------|-------|-------------|--------|
|  |   |  |   | JUMLAH      | %     | JUMLAH      | %      |
|  |   | Program Peningkatan Disiplin Aparatur  | Pengadaan Pakaina Dinas PNS berserta Kelengkapannya                       | 17.000.000  | 0.59% | 17.000.000  | 100%   |
|  |   | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Penyusunan Rencana Pernagkat Daerah                                       | 69.710.900  | 2.44% | 69.710.900  | 100%   |
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan lembaga Kemasyarakatan desa dengan dukungan partisipasi masyarakat | Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerinthan desa yang baik Persentase LPM aktif | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan                            | Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Desa                                     | 22,720,000  | 0.79% | 22,720,000  | 100%   |
|  |   |  | Rapat Koordinasi Pendamping Desa  | 106.320.000 | 3.72% | 106.320.000 | 100%   |
|  |   |  | Pembinaan, Monitoring, Evaluasi Perencanaan Desa                          | 24.000.000  | 0.84% | 24.000.000  | 100%   |
|  |   | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa                | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan  | 39.600.000  | 1.38% | 39.600.000  | 100%   |
|  |   |  | Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu   | 19.824.000  | 0.69% | 19.824.000  | 100%   |
|  |   | Program Pembinaan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa                           | Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa | 229.670.000 | 8.03% | 229.670.000 | 100%   |
|  |   |  | Monitoring Evaluasi Kerjasama   | 23.000.000  | 0.80% | 23.000.000  | 100%   |
|  | Persentase desa yang menerapkan asas transparansi dalam pengelolaan keuangan desa   | Pembinaan Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset Desa                    | Pembinaan Pengelolaan Keuangan desa dan Aset Desa                         | 184.718.500 | 6.46% | 184.608.300 | 99.94% |
|  |   |  | Pelatihan Tim Verifikasi APBDes dan Aset Desa                             | 33.570.000  | 1.17% | 33.570.000  | 100%   |
|  |   |  | Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa                                  | 129.940.000 | 4.54% | 129.883.867 | 99.96% |

| SASARAN  | INDIKATOR                                       | PROGRAM   | KEGIATAN  | ANGGARAN      |             | REALISASI     |        |
|--|---|---|---|---------------|-------------|---------------|--------|
|  |   |   |   | JUMLAH        | %           | JUMLAH        | %      |
|  |   | Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat            | Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa                              | 56.180.000    | 1.96%       | 56.180.000    | 100%   |
|  |   | Program Peningkatan Perkembangan Desa dan Kelurahan | Evaluasi dan Lomba Desa dan Kelurahan   | 37.370.000    | 1.31%       | 37.370.000    | 100%   |
|  | Persentase PKK Aktif                            | Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan     | Sarasehan Penguatan TP. PKK Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten                   | 106,620,000   | 3,73%       | 60.620,000    | 56.86% |
|  | Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK            |   |   |               |             |               |        |
|  | Persentase Lembaga Adat Aktif                   |   | Pelatihan Kader Posyandu di Desa  | 50.360.000    | 1.76%       | 50.360.000    | 100%   |
|  | Persentase Posyandu Aktif                       |   | Bimtek Pemberdayaan Perempuan Perdesaan dalam membangun Desa                          | 147.280.000   | 5.15%       | 147.280.000   | 100%   |
|  |   |   | Sosialisasi dan pembinaan kelompok Perempuan Untuk turut serta dalam Pembangunan desa | 100.000.000   | 3.50%       | 100.000.000   | 100%   |
| Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Desa melalui Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat | Persentase peningkatan jumlah bumdes yang aktif | Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa           | Pembinaan Asosiasi BUMDES Kab. Bone   | 147.250.000   | 5.15%       | 147.250.000   | 100%   |
| Evaluasi dan Pembinaan Penyertaan Mdal Bumdes  |   |   | 543.200.000   | 18.99%        | 543.200.000 | 100%          |        |
| JUMLAH   |   |   |   | 2,860,000.000 |             | 2.812.728.850 | 98.35  |

## BAB IV

### PENUTUP

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2020,

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2020, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa ke depan diantaranya kualitas sumber daya aparatur yang masih perlu ditingkatkan, rasio keterbatasan personil dengan jumlah desa yang ada, dukungan sarana dan prasarana yang belum memadai, belum efektifnya media informasi dari kabupaten ke seluruh desa, kesinambungan program yang masih fluktuatif setiap tahun karena perubahan kebijakan dan regulasi, lemahnya pengelolaan profil desa dan sumber daya desa lainnya sebagai acuan perencanaan pembangunan di desa, menurunnya budaya gotong royong masyarakat desa yang diindikasikan dengan menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan, lemahnya tingkat keberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan dan desa.

Bagi instansi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.